

Pengembangan Sistem Informasi Kesbangpol Kota Palembang Untuk Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan

Muhammad Saripudin, Kurniawan

Universitas Bina Darma Palembang

Penulis Korespondensi: muhammadsaripudin2@gmail.com,
kurniawan@binadarma.ac.id

2,

Article Information:

Received: 22 September 2025, Accepted: 08 Oktober 2025, Published: 30 Januari 2026

Abstract

The National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) is a government agency mandated to provide guidance, supervision, and data management for mass organizations. The results of the information collection revealed several fundamental problems, including inefficient administrative processes in which the registration and verification of mass organizations require the collection and validation of large volumes of documents. If performed manually, this stage is time-consuming and labor-intensive for both Kesbangpol officers and mass organization administrators. The purpose of this study is to build a centralized database that stores all mass organization information in a structured, integrated manner, and to develop an information system capable of transforming mass organization management at Kesbangpol. The system development life cycle (SDLC) method is used, comprising analysis, design, coding, testing, and implementation. The results of this study provide a single source of accurate and real-time data, facilitate access for authorized parties and minimize data errors, strengthen Kesbangpol's supervisory function and encourage mass organizations to be more transparent and responsible in carrying out their activities, making it easier to verify the status of mass organizations, access activity reports, and monitor their compliance with applicable regulations.

Keyword: Inkonsistensi data, Duplikasi, Registrasi, Verifikasi

1. Pendahuluan

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memegang peranan krusial dalam dinamika sosial, politik, dan ekonomi suatu daerah. Di Kota Palembang, keberadaan Ormas yang aktif menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, lingkungan, sosial-budaya, hingga keagamaan. Ormas menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan

Published by:

kebijakan pemerintah, serta katalisator dalam program-program pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan Ormas yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk memastikan kontribusi positif mereka optimal dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengganggu stabilitas daerah (Prayudi, 2022).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang adalah instansi pemerintah yang diamanatkan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan data Ormas. Tugas ini mencakup proses registrasi, verifikasi legalitas, pembaruan data, hingga pelaporan aktivitas Ormas. Namun, dengan jumlah Ormas yang terus bertambah dan beragamnya jenis kegiatan, Kesbangpol Kota Palembang menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan tugas-tugas administratif ini secara manual. Proses yang masih banyak mengandalkan pencatatan fisik, penggunaan lembar kerja terpisah, dan komunikasi tatap muka seringkali mengakibatkan inefisiensi, penumpukan berkas, kesalahan data, dan lambat akses informasi (Ahmadi Damrah, 2023).

Pengelolaan Ormas secara konvensional, yang masih banyak diterapkan di Kesbangpol Kota Palembang, menimbulkan beberapa permasalahan mendasar diantaranya inefisiensi proses administrasi dimana proses registrasi dan verifikasi Ormas memerlukan pengumpulan dan validasi dokumen dalam jumlah besar. Jika dilakukan secara manual, tahapan ini sangat memakan waktu dan tenaga, baik bagi petugas Kesbangpol maupun pengurus Ormas. Antrean panjang, berkas yang hilang atau salah tempat, serta repetisi pengisian data adalah pemandangan umum yang menghambat kelancaran pelayanan. Akibatnya, waktu yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembinaan dan pengawasan justru terbuang untuk urusan administratif (Sekretariat DPRD Jawa Tengah, 2024).

Selain itu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dimana Informasi mengenai status registrasi, legalitas, dan aktivitas Ormas seringkali tidak mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan, termasuk masyarakat umum, lembaga riset, atau bahkan unit kerja lain di dalam pemerintahan daerah (Sahid, 2022). Keterbatasan akses ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi proses pengelolaan Ormas dan mempersulit upaya pengawasan publik. Selain itu, pelaporan aktivitas Ormas yang masih bersifat manual menyulitkan Kesbangpol untuk memverifikasi kebenaran laporan dan memastikan akuntabilitas Ormas terhadap tujuan dan visi misinya (B Irfan, 2024).

Hal lain yang terjadi yaitu keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Tanpa database yang real-time, Kesbangpol kesulitan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang ekosistem Ormas di Kota Palembang. Data historis yang sulit diakses, tren yang tidak teridentifikasi, dan informasi yang tidak terbaru menghambat kemampuan Kesbangpol dalam merumuskan kebijakan pembinaan yang tepat sasaran, mengidentifikasi potensi masalah, atau melakukan intervensi yang diperlukan secara proaktif (Diya MeyFrelinda, 2024).

Menyadari tantangan-tantangan di atas, adopsi teknologi informasi menjadi suatu keharusan. Transformasi digital dalam pengelolaan Ormas bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah urgensi untuk meningkatkan kapasitas Kesbangpol Kota Palembang dalam melayani masyarakat dan mengelola Ormas secara lebih efektif. Pengembangan Sistem Informasi Kesbangpol Kota Palembang untuk Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif yang mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Published by:

Sistem informasi ini akan memungkinkan otomatisasi berbagai proses administratif, mulai dari pendaftaran daring, verifikasi dokumen elektronik, hingga pelaporan digital (Fadiyah Choirunnissa & Oktarina, n.d.). Dengan adanya sistem ini, Kesbangpol dapat membangun sebuah database terpusat yang menyimpan seluruh informasi Ormas secara terstruktur dan terintegrasi. Database ini akan menjadi sumber data tunggal yang akurat dan real-time, memudahkan akses bagi pihak yang berwenang, dan meminimalisir kesalahan data. Lebih jauh lagi, sistem ini akan berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan fitur akses informasi yang terkontrol, stakeholders terkait dapat dengan mudah memverifikasi status Ormas, mengakses laporan aktivitas, dan memantau kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku. Ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan Kesbangpol, tetapi juga mendorong Ormas untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya (Prof et al., 2025).

Pengembangan sistem informasi ini juga sangat relevan dengan pembangunan kota menuju kota cerdas (smart city) yang menekankan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya memberikan manfaat internal bagi Kesbangpol, tetapi juga mendukung agenda pembangunan yang lebih luas (Kabupaten et al., n.d.).

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada perancangan dan pengembangan sebuah sistem informasi yang mampu mentransformasi pengelolaan Ormas di Kesbangpol Kota Palembang. Diharapkan sistem ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai tujuan peningkatan efisiensi administrasi, penguatan database terpusat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Palembang. Keberhasilan implementasi sistem ini akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan akuntabel di Kota Palembang.

1.2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Perancangan basis data secara logis merupakan tahapan untuk memetakan model konseptual ke model basis data yang akan dipakai (model relasional, hirarkis atau jaringan). Perancangan basis data secara fisis merupakan tahapan untuk menuangkan perancangan basis data yang bersifat logis menjadi basis data fisis yang tersimpan pada media penyimpanan external (yang spesifik terhadap DBMS yang dipakai). Untuk memahami kedua tahapan perancangan basis data tersebut, perlu kiranya mengenal daur hidup pengembangan sistem (biasa disebut SDLC/System Development Life Cycle) secara utuh. Hal ini disebabkan perancangan basis data hanya merupakan bagian dari tahapan perancangan sistem, dan tahapan perancangan sistem itu sendiri merupakan salah satu dari sejumlah tahapan pada daur hidup pengembangan sistem. Metodologi yang disebut waterfall atau air terjun yang membagi daur hidup pengembangan sistem. Untuk membuat suatu sistem dibutuhkan beberapa tahapan agar didapat suatu sistem yang benar-benar bermanfaat sesuai kebutuhan, tahapan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut (Pradipta et al., 2022) :

1.2. Analisa

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi literatur. Seorang sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan

Published by:

dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem analis untuk menterjemahkan ke dalam bahasa pemrogram.

1.3. Design

Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada : struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirment. Dokumen inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan sistemnya.

1.4. Coding dan Testing

Coding merupan penerjemahan design dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan meterjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini lah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki.

1.5. Penerapan

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. Setelah melakukan analisa, design dan pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh user.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini membahas berbagai konsep dan teori yang menjadi landasan dalam pengembangan Sistem Informasi Kesbangpol Kota Palembang untuk Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan. Pembahasan meliputi sistem informasi, pengelolaan organisasi kemasyarakatan, basis data, efisiensi administrasi, transparansi, serta penelitian terkait yang relevan.

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi terorganisir dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi (Laudon & Laudon, 2018). Dalam konteks ini, sistem informasi dirancang untuk mendukung operasional, manajerial, dan pengambilan keputusan. Komponen utama dari sistem informasi meliputi (Rafiatunnisa & Noviani, 2025):

- Input: Data mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Dalam kasus ini, data Ormas, dokumen legalitas, dan laporan aktivitas.
- Proses: Serangkaian operasi yang mengubah input menjadi output yang bermakna. Ini meliputi verifikasi data, validasi dokumen, dan pemrosesan laporan.
- Output: Informasi yang dihasilkan dari proses, disajikan dalam bentuk yang berguna bagi pengguna. Contohnya adalah daftar Ormas terdaftar, status verifikasi, dan laporan statistik.
- Penyimpanan (Storage): Mekanisme untuk menyimpan data dan informasi agar dapat

Published by:

diakses di kemudian hari. Ini merujuk pada basis data terpusat.

- e. Umpan Balik (Feedback): Informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan memodifikasi input atau proses. Misalnya, koreksi data yang salah atau penyesuaian prosedur.

2.2 Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Pengelolaan Ormas oleh pemerintah, khususnya Kesbangpol, adalah bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini diatur oleh undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan Ormas beroperasi sesuai koridor hukum dan berkontribusi positif bagi masyarakat (Meylisa Elviora, 2025).

2.3 Basis Data

Basis data adalah kumpulan data yang terorganisasi dan saling terkait yang disimpan secara elektronik dan dapat diakses oleh beberapa pengguna (Connolly & Begg, 2015). Penggunaan basis data adalah kunci untuk mengatasi fragmentasi data dan meningkatkan akurasi informasi (Ady et al., 2023).

2.4 Efisiensi Administrasi

Efisiensi administrasi merujuk pada pencapaian tujuan dengan penggunaan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) yang minimal. Dalam konteks sistem informasi, efisiensi dicapai melalui otomatisasi proses dan optimalisasi alur kerja (Noor Adinda S.F. Lubis & Muhammad Irwan Padli Nasution, 2023).

2.5 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem informasi dapat menjadi katalis untuk mewujudkan kedua prinsip ini.

3. Objek Penelitian

3.1 Profil Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

Badan Kesbangpol merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota bidang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain:

1. Meningkatkan kapasitas organisasi dalam tata Kelola pemerintahan dan pelayan;
2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan;
3. Pengembangan system politik yang demokratis;
4. Membangkitkan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok pedesaan guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
5. Perwujudan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif.

3.2 Tugas Pokok

Adapun tugas pokok dari dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Published by:

Palembang sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang Ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, social, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik serta urusan pemerintahan terkait dengan ketentuan peraturan perundang.

2. Sekretaris

Kedudukan Sekretaris dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan meliputi, perumusan kebijakan dan fasilitasi yang meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas badan dalam mengembangkan ketahanan ekonomi, social, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut.

6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas badan dalam mengembangkan kewaspadaan daerah dan penanganan konflik.

3.3 Data Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan penyampaian data perkumpulan atau ormas Kota Palembang berbentuk badan

Published by:

hukum yang diterima dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia No. W.6-AH.01.07-0171 tertanggal 19 Juni 2025 terdapat 378 ormas. Bentuk lampiran data ormas ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Nama	Alamat	Nomor Sertifikat Pendirian	Nomor Sertifikat Terakhir
1	PEMANTAU PERKARA DAN PENYELESAIAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA	JL. WIRAJAYA I NO. 139 A	AHU-00343.60.10.2014	(belum diset)
2	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LASKAR BUMI SRIWIJAYA	Jalan Rajawali Gedung Legiun Veteran RI	AHU-00500.60.10.2014	(belum diset)
3	FORUM MASYARAKAT SRIWIJAYA BANGKIT	Jalan Husni Thamrin Nomor 1300	AHU-00501.60.10.2014	(belum diset)
4	ASOSIASI KOLEKTOR SRIWIJAYA	Jl. Perintis Kemerdekaan, Lorong Budiman No 757	AHU-00509.60.10.2014	(belum diset)
5	LAW FIRM ASA	JL. RADIO 23	AHU-0000052.AH.01.07. Tahun 2015	AHU-0000052.AH.01.13. Tahun 2015
6	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GRUP MASYARAKAT OGAN ANTI KORUPSI	PALEMBANG	AHU-0000169.AH.01.07. Tahun 2015	AHU-0000169.AH.01.13. Tahun 2015
7	TRISULA	JALAN VOLLY BLOK G-10	AHU-0000305.AH.01.07. Tahun 2015	AHU-0000305.AH.01.13. Tahun 2015
8	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN ANTI KORUPSI	JL. KAPTEN ANWAR SASTRO NO. 1352	AHU-0000324.AH.01.07. Tahun 2015	AHU-0000324.AH.01.13. Tahun 2015

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini membangun sebuah database terpusat yang menyimpan seluruh informasi Ormas

Published by:

secara terstruktur dan terintegrasi serta menghasilkan pengembangan sebuah sistem informasi yang mampu mentransformasi pengelolaan Ormas di Kesbangpol Kota Palembang. Sistem ini dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan peningkatan efisiensi administrasi, penguatan database terpusat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Organisasi Ke-masyarakatan di Kota Palembang. Keberhasilan implementasi sistem ini akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan akuntabel di Kota Palembang.

Database pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dibangun dengan menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Struktur database dirancang untuk mendukung proses pendaftaran, verifikasi, pengolahan data, serta pelaporan yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Palembang. Hasil pembangunan database ini dapat dilihat pada daftar tabel yang telah terbentuk, dimana masing-masing tabel memiliki fungsi khusus dalam mendukung sistem informasi. Beberapa tabel inti yang dihasilkan antara lain:

1. Tabel orma_master

Berfungsi sebagai tabel utama yang menyimpan data pokok Ormas, seperti identitas organisasi, nomor registrasi, alamat sekretariat, serta status keaktifan. Tabel ini menjadi pusat referensi bagi tabel lain yang terhubung.

2. Tabel orma_pengurus

Menyimpan informasi mengenai susunan kepengurusan Ormas, termasuk nama pengurus, jabatan, nomor induk kependudukan (NIK), kontak, serta masa jabatan. Data ini penting untuk memastikan legalitas kepengurusan Ormas yang terdaftar.

3. Tabel orma_riwayat_kegiatan

Berfungsi mencatat aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Ormas. Informasi yang disimpan mencakup judul kegiatan, tanggal pelaksanaan, ringkasan kegiatan, serta dokumentasi berupa foto.

4. Tabel orma_dokumen

Menyimpan dokumen pendukung yang diunggah oleh Ormas dalam proses registrasi maupun verifikasi, seperti sertifikat pendirian, akta organisasi, dan dokumen legalitas lainnya.

5. Tabel orma_bentuk, orma_wilayah, dan orma_sumber_utama

Digunakan untuk mendefinisikan data referensi yang berkaitan dengan klasifikasi bentuk organisasi, wilayah kerja Ormas, serta sumber dana utama organisasi. Tabel-tabel ini membantu dalam standarisasi data yang digunakan di sistem.

6. Tabel kecamatan dan kelurahan

Menyimpan data wilayah administratif yang digunakan untuk mengelompokkan Ormas berdasarkan domisili atau wilayah kerja mereka. Hal ini juga mempermudah penyajian laporan berbasis kecamatan maupun kelurahan.

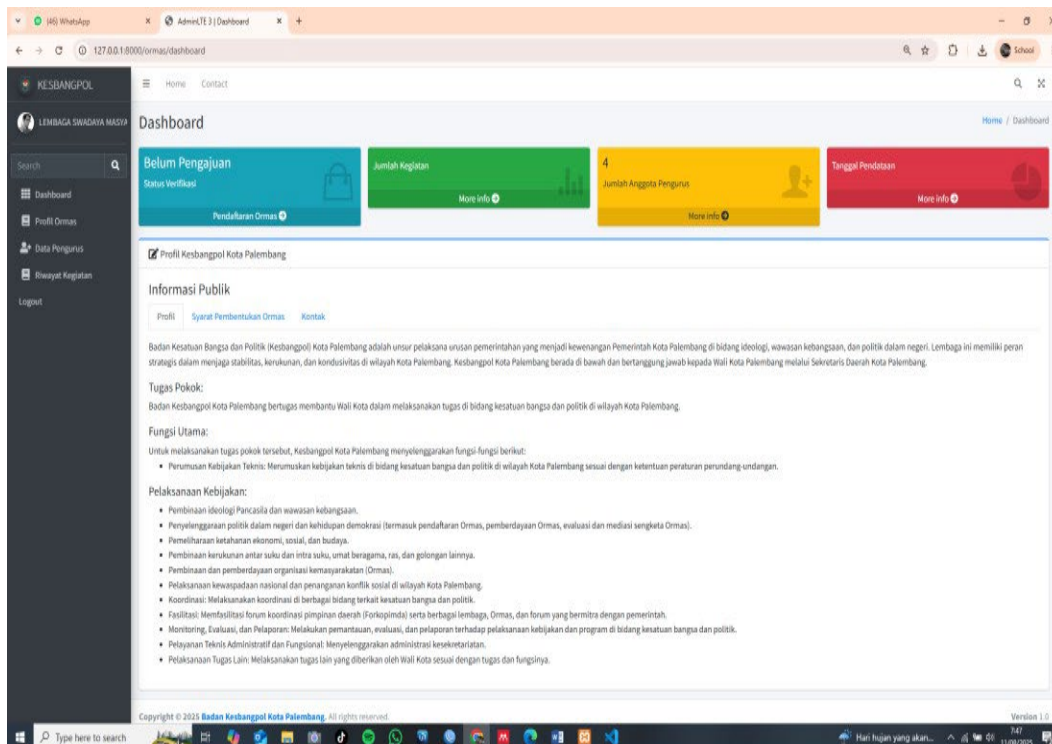
7. Tabel user

Menyimpan data pengguna sistem yang terdiri dari administrator, verifikator, serta pihak

Published by:

Ormas. Tabel ini dilengkapi dengan sistem autentikasi dan otorisasi untuk menjamin keamanan akses.

Berikut ini tampilan hasil dari masing-masing aktor yang dapat dilihat pada Gambar 4.1, Gambar 4.2, dan Gambar 4.3 Menu pada aktor bagian ormas terdiri dari dashboard, profil ormas, data pengurus, riwayat kegiatan dan logout. Menu pada aktor verifikator terdiri dari dashboard, data ormas dan Logout. Sedangkan menu pada aktor admin terdiri Dashboard, Data Ormas, Pengaturan (meliputi kecamatan, kelurahan, bentuk organisasi, wilayah kerja, sumber dana utama, bentuk kegiatan, dan user), hingga menu Laporan ormas yang dapat disajikan berdasarkan kecamatan, kegiatan, sumber dana utama, atau statistik Ormas, dan Logout.

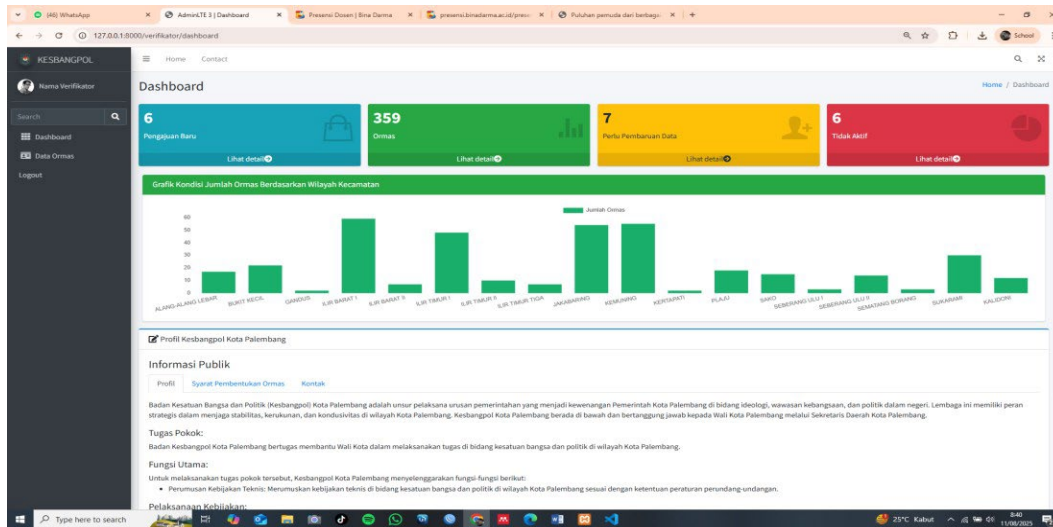


Gambar 1 Halaman Utama Pengguna Ormas

Tampilan dashboard di atas menampilkan empat kotak informasi utama:

1. Status verifikasi lembaga dengan dilengkapi tombol Pendaftaran Ormas,
2. Jumlah Kegiatan (warna hijau) yang menunjukkan total kegiatan lembaga,
3. Jumlah Anggota Pengurus (warna kuning),
4. Tanggal Pendataan (warna merah) yang menginformasikan jadwal atau waktu pelaksanaan pendataan.

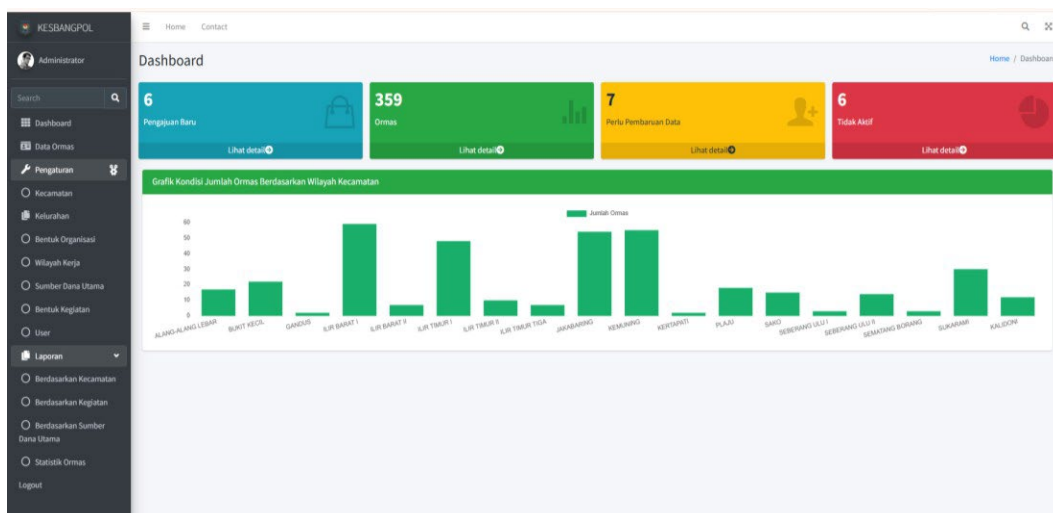
Published by:



Gambar 2 Halaman Utama Verifikator

Berdasarkan gambar 2 yang ditampilkan, halaman Dashboard pada sistem KESBANGPOL kali ini diakses oleh pengguna dengan peran Verifikator. Tampilan utama menyajikan ringkasan informasi dalam empat kotak indikator:

1. Pengajuan Baru (warna biru) yang menunjukkan jumlah permohonan pendaftaran Ormas yang perlu diverifikasi,
2. Ormas terdaftar (warna hijau),
3. Perlu Pembaruan Data (warna kuning) yang menandakan adanya Ormas dengan data yang harus diperbarui,
4. Tidak Aktif (warna merah) untuk menandai Ormas yang statusnya sudah tidak aktif.



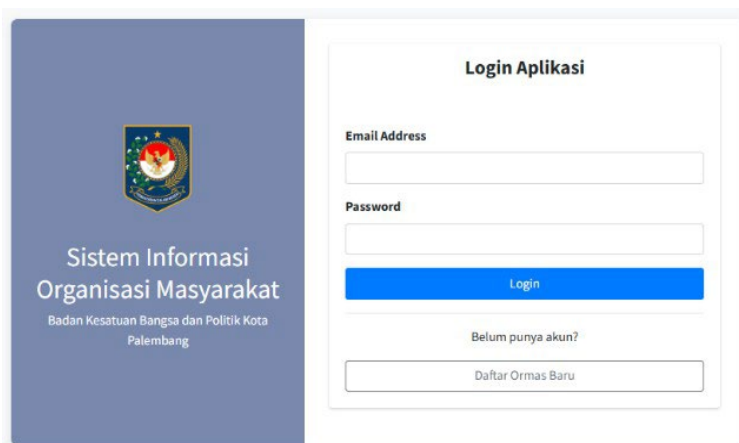
Gambar 3 Halaman Utama Bagian Admin

Berdasarkan gambar 5.3 yang ditampilkan, halaman Dashboard pada sistem KESBANGPOL diakses oleh pengguna dengan peran administrator menampilkan rangkuman informasi utama terkait data organisasi masyarakat (Ormas) di wilayah tertentu. Di bagian atas terdapat empat kotak informasi berwarna berbeda, masing-masing menunjukkan indikator penting: Pengajuan Baru (warna biru), total Ormas terdaftar (warna hijau), Perlu Pembaruan Data (warna kuning), serta Tidak Aktif (warna merah). Setiap kotak dilengkapi tombol “Lihat detail” untuk menampilkan informasi lebih lengkap. Di bagian tengah halaman, terdapat grafik batang berwarna hijau yang memperlihatkan Kondisi Jumlah Ormas Berdasarkan Wilayah Kecamatan. Grafik ini membandingkan jumlah Ormas di berbagai kecamatan. Menu navigasi di sisi kiri layar menampilkan berbagai fitur sistem, mulai dari Dashboard, Data Ormas, Pengaturan (meliputi kecamatan, kelurahan, bentuk organisasi, wilayah kerja, sumber dana utama, bentuk kegiatan, dan user), hingga menu Laporan yang dapat disajikan berdasarkan kecamatan, kegiatan, sumber dana utama, atau statistik Ormas. Tampilan ini menunjukkan bahwa sistem dirancang untuk memudahkan monitoring, analisis, dan pengelolaan data Ormas secara terpusat dan terstruktur.

Berdasarkan hasil yang ada, maka bagian ini akan membahas tentang pengembangan Sistem Informasi Kesbangpol Kota Palembang untuk Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan.

4.1 Pengguna Ormas

Berdasarkan permasalahan bahwa proses registrasi dan verifikasi Ormas memerlukan pengumpulan dan validasi dokumen dalam jumlah besar sehingga sangat memakan waktu dan tenaga, baik bagi petugas Kesbangpol maupun pengurus Ormas. Oleh karena itu pengguna ormas harus melakukan registrasi secara online sebelum mengajukan permohonan sebagai ormas yang terdaftar di Kesbangpol.



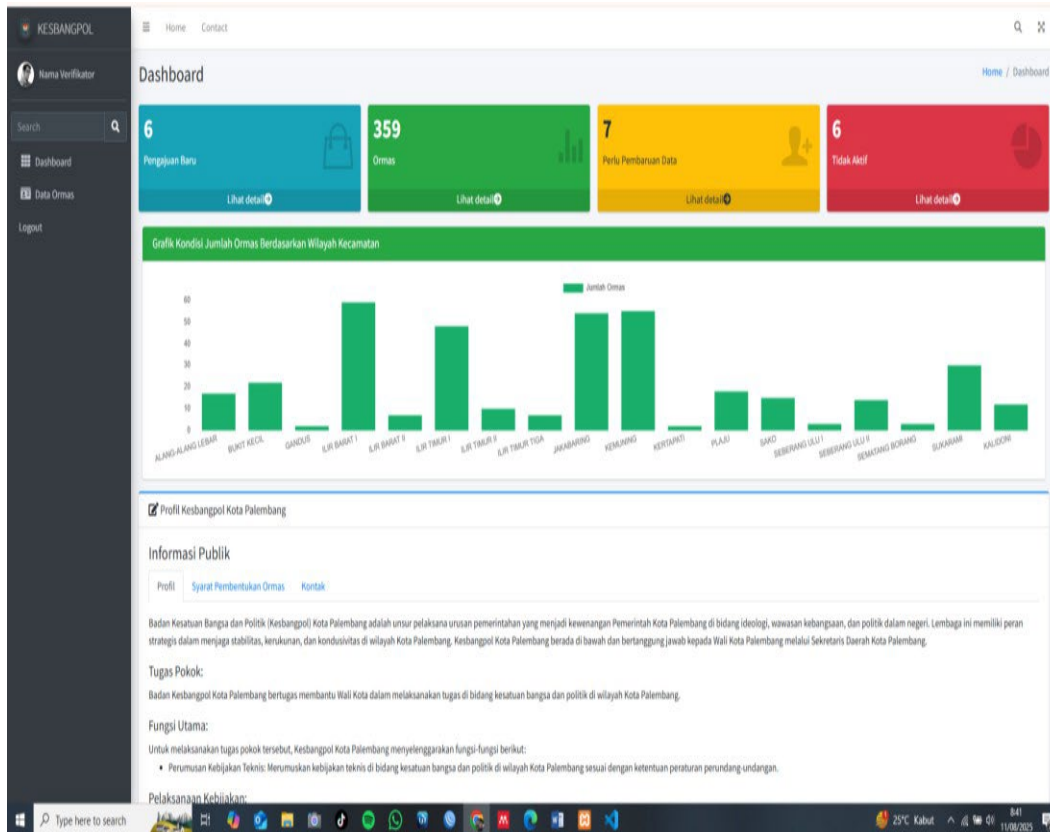
Gambar 4 Tampilan Proses Registrasi

4.2 Pengguna Verifikator

Berdasarkan permasalahan bahwa proses registrasi dan verifikasi Ormas memerlukan pengumpulan dan validasi dokumen dalam jumlah besar sehingga sangat memakan waktu dan tenaga, baik bagi petugas Kesbangpol maupun pengurus Ormas. Oleh karena itu pengguna verifikator melakukan verifikasi secara online yang akan memutuskan

Published by:

apakah ormas dapat diaktifkan atau tidak atau pun ada pembaharuan data yang harus diperbaiki oleh ormas



Gambar 5 Tampilan Dashboard Pengguna Verifikaotr

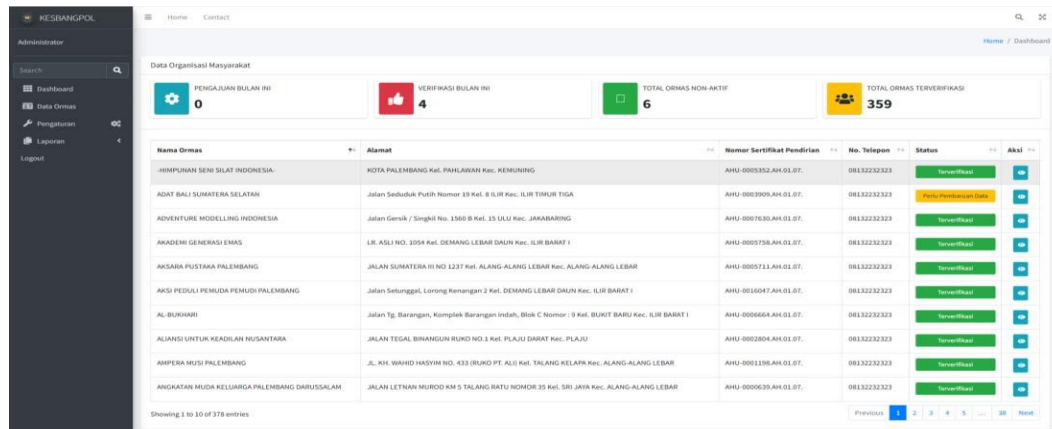
4.3 Pengguna Administrator

Bagi administrator sebuah sistem yang dibangun dapat memudahkan monitoring, analisis, dan pengelolaan data Ormas secara terpusat dan terstruktur. Berdasarkan menu navigasi yang telah dibangun menampilkan berbagai fitur sistem, mulai dari Dashboard, Data Ormas.

Pengaturan (meliputi kecamatan, kelurahan, bentuk organisasi, wilayah kerja, sumber dana utama, bentuk kegiatan, dan user), hingga menu Laporan yang dapat disajikan berdasarkan kecamatan, kegiatan, sumber dana utama, atau statistik Ormas. Proses pengajuan dan proses.

Verifikasi data ormas dapat dipantau oleh admin melalui tampilan Gambar 6 berikut dimana data ormas yang masuk ataupun yang telah mengajukan pada bulan berjalan, yang telah diverifikasi oleh verifikator di bulan berjalan, ormas yang non-aktif, serta ormas yang terverifikasi semua data dapat terpantau.

Published by:



Nama Ormas	Alamat	Nomor Sertifikat Pendirian	No. Telepon	Status	Aksi
HIMPUNAN SENI SLAT INDONESIA	KOTA PALEMBANG Kel. PAHLAWAN Kec. KEMUNING	AHU-000532.AH.01.07.	08132232323	Terverifikasi	Verifikasi
ADAT BALI SUMATERA SELATAN	Jalan Sebiduk Putih Nomor 39 Kel. 8 ILIR Kec. ILIR TIMUR TIGA	AHU-000909.AH.01.07.	08132232323	Pada Proses Verifikasi Data	Verifikasi
ADVENTURE MODELLING INDONESIA	Jalan Gersik / Singkil No. 150 B Kel. 15 ULU Kec. JAKABARING	AHU-0007630.AH.01.07.	08132232323	Terverifikasi	Verifikasi
AKADEMI GENERASI EMAS	J.R. ASLI NO. 1394 Kel. DEMANG LEBAR DAUN Kec. ILIR BARAT I	AHU-0005738.AH.01.07.	08132232323	Terverifikasi	Verifikasi
AKSARA PUSTAKA PALEMBANG	JALAN SUMATERA II NO 1237 Kel. ALANG-ALANG LEBAR Kec. ALANG-ALANG LEBAR	AHU-0005711.AH.01.07.	08132232323	Terverifikasi	Verifikasi
AKSI PEDULI PEMUDA PEMUDA PALEMBANG	Jalan Setunggal, Lorong Kemangan 2 Kel. DEMANG LEBAR DAUN Kec. ILIR BARAT I	AHU-0016047.AH.01.07.	08132232323	Terverifikasi	Verifikasi
AL-BUKHARI	Jalan Tg. Barangan, Komplek Barangan Indah, Blok C Nomor : 9 Kel. BUKIT BARU Kec. ILIR BARAT I	AHU-0006664.AH.01.07.	08132232323	Terverifikasi	Verifikasi
ALANSI UNTUK KEADILAN NUSANTARA	JALAN TEGAL BINANGUN RUKO NO 2 Kel. PLAUJ DARAT Kec. PLAUJ	AHU-0002804.AH.01.07.	08132232323	Terverifikasi	Verifikasi
AMPERA PUSI PALEMBANG	JL. KH. WAHID HADYON NO. 433 (BUND P.T. ALI) Kel. TALANG KELATN Kec. ALANG-ALANG LEBAR	AHU-0001196.AH.01.07.	08132232323	Terverifikasi	Verifikasi
ANGKATAN MUDA KELUARGA PALEMBANG ORGUSALAM	JALAN LETNAN MURDOO KM 5 TALANG RAYU NOMOR 35 Kel. SRI JAYA Kec. ALANG-ALANG LEBAR	AHU-0000639.AH.01.07.	08132232323	Terverifikasi	Verifikasi

Gambar 4.6 Tampilan Pantauan Data Ormas

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kesbangpol Kota Palembang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Database pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dibangun dengan menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Struktur database dirancang untuk mendukung proses pendaftaran, verifikasi, pengolahan data, serta pelaporan yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Palembang. Hasil pembangunan database ini mampu memberikan integrasi data yang terpusat, meminimalisir redundansi, serta mendukung kebutuhan analisis dan pelaporan secara cepat dan akurat. Implementasi database ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan sistem informasi pengelolaan Ormas di Kesbangpol Kota Palembang.
2. Sistem informasi yang dibangun mampu meningkatkan efisiensi administrasi dengan menggantikan proses manual menjadi proses digital. Hal ini terbukti melalui implementasi fitur pendaftaran daring, verifikasi dokumen elektronik, serta pelaporan digital yang mengurangi penumpukan berkas fisik dan mempercepat pelayanan, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui ketersediaan akses informasi status Ormas, riwayat kegiatan, serta laporan aktivitas yang dapat diverifikasi secara digital. Hal ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan Kesbangpol, tetapi juga mendorong Ormas untuk lebih transparan dalam menjalankan aktivitasnya. Selain itu sistem informasi yang dikembangkan memberikan dukungan pengambilan keputusan berbasis data dengan menyediakan laporan historis, tren, serta data analitik yang relevan. Informasi ini memudahkan Kesbangpol dalam merumuskan kebijakan pembinaan yang tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika sosial.

Agar sistem informasi ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM

Kesbangpol perlu melakukan pelatihan secara berkala bagi pegawai maupun pengurus Ormas agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik, serta memahami prosedur digital yang berlaku.

2. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Sistem yang telah dibangun perlu dilakukan pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan, seperti penambahan fitur integrasi dengan aplikasi pemerintah lain, notifikasi otomatis, serta dashboard analitik yang lebih interaktif.

3. Penguatan Infrastruktur Teknologi

Diperlukan dukungan infrastruktur jaringan, server, dan keamanan yang memadai agar sistem dapat diakses dengan stabil, cepat, dan bebas dari gangguan teknis, terutama saat volume penggunaan meningkat.

4. Aspek Keamanan Data

Karena sistem menyimpan data penting dan sensitif, Kesbangpol perlu menerapkan standar keamanan informasi, seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, dan audit log, untuk mencegah penyalahgunaan maupun kebocoran data.

5. Evaluasi dan Umpan Balik Pengguna

Evaluasi berkala perlu dilakukan dengan melibatkan pengguna sistem (pegawai Kesbangpol dan perwakilan Ormas) guna mengidentifikasi kendala, menampung masukan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan agar sistem semakin sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Daftar Pustaka

- Ady, I., Suwito, P., Wirawan, P., Ahmad, I., Irmawati, M., Agus, C., Khairunnisa, S., Tati, M. P., Teguh, E., Angga, S., Permana, A., s Ekawati, N. (2023). *Sistem Komputer Dan Informasi* (S. T., M. K. DR. RUDI MULYA, Ed.). CV. Gita Lentera. <https://gitalentera.com>
- Ahmadi Damrah. (2023). *Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Palembang*. <https://esakip.palembang.go.id/1823/dokumen/108/2023/c56adf6838eabbfc7e81bfd8761dfdb6.pdf>
- Angga, T. H., Hikmah, N., Budiman, F. A., s Fitria, S. (2016). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (Simponie) Berbasis Website Dengan Menggunakan Ci Framework*. 3(2), 76–60.
- Ardani, I., s Cahyani, H. S. H. (2022). Tantangan Kebijakan Satu Data Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 25(1), 52–60. <https://doi.org/10.22435/hsr.v25i1.4167>
- B Irfan. (2024). *Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Luwu Utara* (eprints.stialanmakassar.ac.id, Trans.). <https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/2228/8/10.%20BAB%20I.pdf>
- BPK RI. (n.d.). *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia*.
- Diya MeyFrelinda. (2024). *Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bogor dalam Mensosialisasikan Aplikasi Sistem Informasi Berbagai Sduan Dan Saran*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456786/51126/1/DIYA%20MEYF_RYLINDA-FDK.pdf
- Fadiyah Choirunnissa, N., s Oktarina, N. (n.d.). *Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Administratif Kantor* (Book Chapter Administrasi Perkantoran, Ed.). Universitas

- Semarang. <https://doi.org/10.15264/bap.v1i1.278>
- Hadi, T. (2022). *Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2015* (Universitas Jambi, Trans.). <https://repository.unja.id/>
- Irfan. (2023). *Transparansi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Luwu.*
- Kabupaten, D., Ailiyatus, S., s Sulfatul Qoida, Z. (n.d.). Pembangunan Daerah Melalui Implementasi Smart City. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4, 2024. Retrieved August 14, 2025.
- Kristianto, D., s Findawati, Y. (n.d.). Perancangan dan Analisis Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Sebagai Pengembangan E-government Di Kecamatan Krembung. *Julyxxxx*, x, No.x, 1–5.
- Meylisa Elviora, A. P. (2025). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam Penerimaan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. *Universitas s Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*, 5, 366–374. : <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Muhammad. (n.d.). *Implementasi Business Process Reengineering Untuk Meminimalisir Keluhan Pelanggan Skripsi.*
- Noor Adinda S.F. Lubis, s Muhammad Irwan Padli Nasution. (2023). Optimalisasi Efisiensi Bisnis Organisasi Melalui Pemanfaatan Sistem Dan Teknologi Informasi. *Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro Dan Informatika*, 2(4), 264–271. <https://doi.org/10.55606/jtmei.v2i4.3130>
- Nurhayati, S. T., Irwan, M., s Nasution, P. (2023). Database Management System Pada Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(2), 62–64. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Prabowo, A., Qori,), Hidayah, H., Sharen,), Sianggara, M., Orix Khoermala, D., Teknik Informatika, J., Artikel, R., s Kunci, K. (2025). *Optimalisasi Manajemen Perpustakaan:*
- Pradipta, R. A., Wintoro, P. B., s Budiyanto, D. (2022). Perancangan Pemodelan Basis Data Sistem Informasi Secara Konseptual Dan Logikal. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 10(2). <https://doi.org/10.23660/jitet.v10i2.2541>
- Pratiwi, S., Tatuhey, E. L., s Lahallo, J. (2025). *Sistem Informasi Manajemen Bantuan Hibah Parpol pada Badan Kesbangpol: Studi Kasus Kabupaten Sarmi.*
- Prayudi, A. W. J. L. D. S. L. (2022). *Peran Organisasi Masyarakat Dalam Negara* (M. Dr. Kris Nugroho, Ed.; 1st ed.). Publica Indonesia Utama. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_tim/buku-tim-public-160.pdf
- Prof, O. :, Tarumingkeng, R. C., Manajemen, G. B., s Pascasarjana, S. (2025). *Transparansi dan Keamanan.* <https://rudycr.com/ab/Blockchain.dalam.Pemasaran-Transparansi.dan.Keamanan.Data.Konsumen.pdf>
- Rafiatunnisa, A., s Noviani, D. M. (2025). *Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen (SIM) (Basic Concept of Management Information System (MIS)) Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen (SIM) (Basic Concept of Management Information System (MIS))* (Vol. 1, Issue 1). <https://lenterapendidikan.hadana.id/>
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., s Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis:*

Journal of Economics and Business, 7(2), 1461. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1462>

Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Sahid, F. N. (2022). *Parapolitika Journal Of Politics And Democracy Studies Membangun Organisasi Masyarakat Sipil yang Sehat dan Akuntabel (Journal Of Politics And Democracy Studies, Trans.)*. <https://id.wikipedia.org/wiki>,

Sekretariat DPRD Jawa Tengah. (2024). *Lapdul Kajian Analisis Regulasi Terhadap Ormas*. https://jdih.dprd.jatengprov.go.id/content/Kajian_PERDA_2024/3.%20Lapdul%20Kajian%20Analisis%20Regulasi%20Terhadap%20Ormas.pdf

SHALSABIEL MUQOMAH FADHL. (2024). *Digitalisasi Berbasis Sistem Informasi Dan Administrasi Guru Agama (Siaga) Dalam Upaya Meningkatkan Layanan Administrasi Guru Agama (Studi Kasus di Kementerian Agama Kota Pasuruan)*.

Sistem Basis Data Terdistribusi Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD). 4(2), 137–147. <https://doi.org/10.55123>

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

